

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada permulaan abad XX yakni tahun 1901 pemerintah kolonial mulai melakukan serangkaian perubahan-perubahan penting dalam kebijakan politiknya di Hindia-Belanda yang dikenal dengan Politik Etis. Ketiga prinsip dalam Politik Etis tersebut bertujuan meningkatkan harkat dan kemakmuran penduduk pribumi, terutama melalui prinsip pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Robert Van Neil (Robert Van Neil 1984:102) bahwa : “ Tujuan dari semua pendidikan ini sebagaimana digambarkan di dalam politik Etis kolonial, adalah untuk membebaskan orang Indonesia menjalankan peranan yang lebih aktif dalam masa depan politik, ekonomi dan sosial mereka.”

Pendidikan berorientasi Barat yang diperoleh kaum pribumi ternyata memunculkan kaum Elite yang bersikap anti Barat, seperti yang dikatakan Nasution (Nasution 2008:19) bahwa: “Pendidikan berorientasi Barat, walaupun terbatas pada golongan kecil dan dimaksud untuk menghasilkan pegawai, menimbulkan elite intelektual baru, banyak sekali menjadi asing terhadap kebudayaan tradisional.

Namun elit ini menjadi juru bicara nasionalisme Indonesia yang anti Barat. Pendidikan yang seyogyanya mendekatkan bangsa Belanda dan Indonesia, dalam kenyataan menjauhkan mereka”.

Tahun 1903 Undang-undang Desentralisasi disahkan parlemen Belanda. Desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda adalah penyerahan sebagian dari pada kekuasaan pemerintah pusat (*central bestuur*) kepada pemerintahan regional dan lokal (*regionale en locale besturen*) (Suradi 1997: 8). Setelah itu, dibentuklah dewan rakyat atau *Volksraad* tahun 1916 yang kemudian disahkan pada tahun 1918. *Volksraad* bukanlah parlemen sebagai suatu badan legislatif. Kedudukan *Volksraad* merupakan sebagai pemberi nasihat terhadap persoalan mengenai anggaran, perhitungan dan juga memiliki wewenang untuk mengajukan petisi.

Salah satu anggota *Volksraad* yang muncul sebagai perintis kemerdekaan adalah Mohammad Hoesni Thamrin. Thamrin memang berpaham politik kooperatif yang diartikan sebagai orang yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan duduk sebagai anggota dewan.

Titik awal perjuangannya dimulai dari kedudukannya di Dewan Kota, *Gemeenteraad* 1919-1927. Dalam sidang dewan, dia menyarankan untuk memperbaiki pengelolaan distribusi beras, mengadakan fasilitas drainase yang layak serta pasokan air bersih ke kampung-kampung.

Ia juga mengusulkan adanya penyiraman tiap hari untuk kampung-kampung yang berdebu dengan pemasangan pompa-pompa air (Bob Hering 2003:63). Kemudian Pada tanggal 16 Mei 1927 Thamrin resmi diangkat untuk duduk di kursi *Volksraad*.

Sejak pecahnya perang di Eropa dan pendudukan Belanda oleh Jerman, mengungsinya pemerintah Belanda ke London menyebabkan terlalu banyak perintah dari negeri Belanda terhadap pemerintah Hindia. Hal ini membutakan harapan dan aspirasi Thamrin akan kemerdekaan Indonesia.

Thamrin tetap gencar berusaha untuk mencari tempat lain sebagai media yang dapat merealisasikan kemerdekaan Indonesia. Namun ditengah-tengah usahnya itu, selalu ada lawan politik yang berusaha untuk menjatuhkannya.

Hari Senin pagi 6 Januari 1941 tiga orang reserse PID menggeledah kantor koran *Pemandangan* di Senen. Yang ditemukan salinan surat Thamrin kepada Thabrani 7 Mei 1940 yang memintanya untuk mengecam pemerintah Belanda karena mengungsi ke London. Akan tetapi surat asli yang dicari tidak ditemukan, namun hal itu dianggap cukup alasan untuk menggeledah rumah Thamrin yang dilakukan pada malam hari yang sama.

Di rumahnya Thamrin sedang berbaring di tempat tidurnya dalam keadaan demam mungkin disebabkan oleh gangguan ginjal, kecapean dan malaria.

Rumahnya diisolasi sejak penggeledahan terjadi, dan pada pagi hari buta Sabtu 11 Januari 1941 ia menghembuskan nafas terakhirnya sebelum ulang tahunnya yang ke-47.

Seyogyanya, Thamrin diangkat menjadi pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin Indonesia, yang masa hidupnya karena terdorong oleh rasa cinta kepada Tanah air dan Bangsa memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia . Melalui keputusan Presiden No. 175 Tahun 1960 ditetapkan bahwa Sdr. Mohammad Hoesni Thamrin patut diberi penghargaan oleh Negara. Namun apa sebenarnya yang menjadi usaha-usaha yang dilakukannya di pergelutan politik sehingga mampu menjadikannya sebagai perintis kemerdekaan Indonesia? Bagaimana Thamrin yang dikenal sebagai nasionalis revolusioner mampu bergerak bebas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dalam konstitusi Hindia? Olehkarena itu tema ini perlu diangkat untuk membuka wawasan baru bagi historiografi Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya yaitu:

1. Perkembangan sosial-politik Batavia di penghujung abad ke-19 sebelum kelahiran Mohammad Hoesni Thamrin.

2. Latar belakang keterlibatan Mohammad Hoesni Thamrin di dunia perpolitikan
3. Usaha-usaha Mohammad Hoesni Thamrin di bidang politik guna meraih kemerdekaan Indonesia
4. Pemikiran-pemikiran Mohammad Hoesni Thamrin guna meraih kemerdekaan Indonesia
5. Hubungan politik Mohammad Hoesni Thamrin berhaluan ko dengan Soekarno yang berhaluan non ko
6. Mohammad Hoesni Thamrin sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Karena luasnya masalah yang harus dibahas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus. Oleh karena itu, penelitian dibatasi berdasarkan identifikasi masalah, yaitu :

1. Latar belakang keterlibatan Mohammad Hoesni Thamrin di dunia perpolitikan
2. Usaha-usaha Mohammad Hoesni Thamrin di bidang politik guna meraih kemerdekaan Indonesia
3. Mohammad Hoesni Thamrin sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang keterlibatan Mohammad Hoesni Thamrin di dunia perpolitikan?
2. Apa saja usaha-usaha Mohammad Hoesni Thamrin di bidang politik guna meraih kemerdekaan Indonesia?
3. Mengapa Mohammad Hoesni Thamrin diangkat sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang keterlibatan Mohammad Hoesni Thamrin di dunia politik
2. Untuk mengetahui usaha-usaha Mohammad Hoesni Thamrin di bidang politik guna meraih kemerdekaan Indonesia.
3. Untuk mengetahui alasan penetapan Mohammad Hoesni Thamrin sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional.

F. Manfaat penelitian

Diharapkan dengan tercapainya tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai siapa dan bagaimana perjuangan Mohammad Hoesni Thamrin sebagai perintis kemerdekaan.
2. Memberikan informasi kepada pembaca bagaimana kesantunan Mohammad Hoesni Thamrin dalam berpolitik agar pembaca maupun peneliti dapat mencontoh beliau dalam berpolitik.
3. Untuk memperkaya sejarah Indonesia dengan fakta-fakta yang lebih akurat dan objektif.
4. Masukan kepada sejarawan pendidik Indonesia
6. Memberikan wawasan kepada peneliti tentang penulisan sebuah karya tulis ilmiah.